

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Farid, Andi Zainal Abidin. 2000. *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia*. Volume 1. Nomor 2. Juli 2000.
- Hamzah, Andi. 1985. *Hukum Acara Pidana Dasar-Dasar*. Jakarta: UI Press.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Moh. 2014. *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Marsono. 2002. *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*. Jakarta: Eko Jaya
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Bandung: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: Laksbang
- Saleh, K. Wanjtik. 1995. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Sunggu, Tumbur Ompur. 2012. *Kebaradaan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Suparman. 2014. *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Hasil Setelah Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terjemahan R. Soesilo.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terjemahan R. Soesilo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Makalah

Wisnubroto, Aloysius. 2001. "Mengkritisi RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Makalah*. disampaikan dalam Forum Diskusi yang Diselenggarakan oleh Bagian Hukum Acara dan Bagian Hukum Pidana FH Atmajaya, Yogyakarta, tanggal 30 Nopember 2001.